

ANALISIS POTENSI PENERBITAN SUKUK DAERAH DALAM PEMBIAYAAN *GREEN INFRASTRUCTURE* DI DKI JAKARTA

ANALYSIS OF MUNICIPAL SUKUK ISSUANCE POTENTIAL IN GREEN INFRASTRUCTURE FINANCING IN DKI JAKARTA

Indar Fauziah Ulfah^{1a}

^{1a}Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Terbuka, Jl. Pd. Cabe Raya, Pd. Cabe Udik, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan, e-mail : indar@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

The biggest challenge in the development of infrastructure in a region is about the budget of local income spending that must be effectively and efficiently managed by the local government. The infrastructure gap in Indonesia is an important problem to overcome. This has become one of the challenges in the development of Islamic financial instruments, especially the financing of regional infrastructure, which is the development challenge in Indonesia without relying on APBD. At present, Indonesia has not published any municipal sukuk although the legal basis already exists, so it is a challenge and a potential opportunity to issue a municipal Sukuk. This research tries to analyze the regional sukuk issuance strategy by prioritizing green economy aspects, so the goal is to develop green infrastructure. The research method used is qualitative with using a SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-Threat) analysis tool with the EFAS-IFAS interaction matrix from this study, it was found that the Weaknesses-Opportunities (WO) strategy based on the EFAS-IFAS SWOT interaction matrix was the most appropriate strategy, namely making derivative regulations from POJK Number 63/POJK.04/2017 the Year 2017 concerning regulation: HR, Financial Reporting, Authority Underlying Assets, and Procedures in the marketing aspect to the public so as not to collide with the sukuk issued by the central government.

Keywords: APBD, Green Infrastructure, Municipal Sukuk, SDGs

ABSTRAK

Tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di suatu daerah adalah mengenai anggaran pendapatan belanja daerah yang harus dengan efektif dan efisien dikelola oleh pemerintah daerah. Ketimpangan infrastruktur yang ada di Indonesia menjadi permasalahan penting untuk diatasi. Ini menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan instrumen keuangan Islam terutama pembiayaan infrastruktur daerah yaitu tantangan pemerataan pembangunan di Indonesia tanpa mengandalkan APBD. Saat ini Indonesia belum ada yang menerbitkan sukuk daerah walaupun secara landasan hukum sudah ada, sehingga menjadi tantangan dan potensi peluang agar bisa menerbitkan sukuk daerah. Penelitian ini mencoba menganalisis strategi penerbitan sukuk daerah dengan mengedepankan aspek *green economy*, dan yang menjadi tujuan adalah pembangunan *green infrastructure*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan alat analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*) dengan matriks interaksi EFAS-IFAS. Dari penelitian ini ditemukan strategi Kelemahan-Peluang (WO) adalah strategi paling tepat, yaitu membuat peraturan turunan dari POJK Nomor 63/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang pengaturan: SDM, pelaporan keuangan, wewenang underlying aset, dan prosedur

dalam aspek pemasaran kepada masyarakat agar tidak terbentur dengan sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Kata Kunci: APBD, Infrastruktur Hijau, Sukuk daerah, SDGs

Ulfah, Indar Fauziah. 2023. Analisis Potensi Penerbitan Sukuk Daerah Dalam Pembiayaan *Green Infrastructure* di DKI Jakarta. *Jurnal Syarikah* 9 (1): 1-10.

PENDAHULUAN

Instrumen keuangan Islam mengalami peningkatan secara signifikan, terutama instrumen pasar modal syariah. Salah satu instrumen pembiayaan dalam pasar modal syariah adalah sukuk yang memiliki kemiripan dengan obligasi. Sukuk telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia dimulai pada tahun 2002 dengan total penerbitan mencapai Rp. 175 Miliar hingga Januari 2022 telah mencapai Rp. 35,02 Triliun (Fatah, 2011). Dalam hal adanya pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia dan dunia dalam tahun 2019 sampai saat ini tidak menurunkan tren peningkatan total emisi penerbitan sukuk di Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa investor di Indonesia sudah mulai memahami bahwa instrumen investasi ini memberikan return yang menarik, bahkan dalam surveinya Muharam et al (2019) mayoritas sekitar 58% investor sukuk saat ini adalah generasi millennial. Ini merupakan dampak dari surplus demografi yang terjadi oleh generasi dengan rentang tahun kelahiran 1990-2000.

Pembangunan Infrastruktur di daerah saat ini semakin kompleks dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah yang mencapai USD 424, 57 Miliar (RPJMN 2015-2019). Pemerintah daerah diharapkan jangan hanya mengandalkan APBN atau APBD, pertimbangkan untuk mencari sumber pendanaan baru. Pemerintah bersama OJK mendorong POJK Nomor 63/POJK.04/2017 bagi provinsi untuk menerbitkan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan APBD. Sukuk daerah ini dimaksudkan sebagai sumber pembiayaan

infrastruktur daerah yang produktif, bukan konsumsi rutin. Selama ini belum ada daerah yang mengadopsi sukuk (Smaoui et al., 2020). Hal ini disebabkan beberapa kendala diantaranya hambatan hukum yaitu pemberlakuan peraturan daerah khusus terkait pengaturan obligasi syariah atau sukuk pemerintah daerah dan jenis aset yang digunakan sebagai *underlying* dan sekuritisasi untuk menyimpan nilai (Amornsiripanitch, 2022).

Koordinasi penegakan syariah dengan Dewan Syariah Nasional juga diperlukan untuk menjaga kepatuhan Syariah (Ibrahim & Shirazi, 2020). Selain itu, juga dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pemeriksa terkait prosedur pelaporan yang sulit didamaikan antara kedua otoritas pengawas tersebut. Sebagai aturan, otoritas pasar modal mensyaratkan audit oleh auditor ketika obligasi diterbitkan, sedangkan lembaga pemerintah harus diaudit oleh BPK.

Infrastruktur di DKI Jakarta mengalami perkembangan sangat pesat, karena merupakan ibu kota negara sehingga perlu untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan potensi daerah dan mengurangi permasalahan-permasalahan lingkungan. Seperti kita ketahui DKI Jakarta memiliki penduduk yang sangat padat, hal ini tentu beresiko dengan masalah-masalah lingkungan terutama polusi udara, polusi air, dan pencemaran tanah. Dalam hal ini efek yang dihasilkan beragam seperti banjir, adanya penyakit yang ditularkan lewat udara yang kotor, air bersih menjadi sulit, dan pengembangan zona hijau menjadi hal yang sulit dilaksanakan.

Maka penting untuk memperhatikan zona hijau dalam pembangunan infrastruktur, istilah yang kita sering sebut dengan *green economy* maka dalam pembangunan infrastruktur di daerah target yang ingin dicapai dalam pembiayaan syariah melalui sukuk daerah ini adalah pembangunan *Green Infrastructure* sehingga dalam proses pembiayaan proyek yang menjadi *underlying asset* harus mengutamakan aspek green, serta mengurangi polusi dan gas emisi karbon. Negara-negara lain yang sudah menerbitkan sukuk daerah yaitu salah satu negara bagian Jerman, negara bagian Saxony-Anhalt, mengeluarkan sukuk daerah sebesar 100 juta euro pada Juli 2004 (Wang & Yang, 2021). Di Malaysia, Kota Pasir Gudang di Johor juga mengeluarkan sukuk daerah senilai 80 juta ringgit Malaysia pada tahun 2005 (Cornaggia et al., 2022).

Penelitian sebelumnya tentang sukuk daerah ditemukan dalam banyak penelitian, seperti Harimurti et al (2011) yang mengkaji tantangan dan strategi dalam pengalokasian sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur daerah. Kajian serupa dilakukan oleh Mawardi et al (2022) tentang strategi dan tantangan dalam pemberian sukuk daerah di Indonesia, keduanya menggunakan metodologi yang sama yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan ANP (*Analytical Network Process*). Namun literasi di jurnal terindeks seperti Scopus di berbagai negara menggunakan pinjaman yang lebih umum. Maka berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengamati bagaimana potensi penerbitan sukuk daerah dalam pembiayaan *green infrastructure* di DKI Jakarta.

MATERI DAN METODE

Sukuk

Sukuk adalah surat berharga berbasis syariah jangka panjang yang diterbitkan oleh emiten kepada pemegang Obligasi

Syariah dimana pada saat pelunasan emiten wajib membayar pendapatan berupa dividen/margin/fee kepada pemegang sukuk dan aset (Aziz et al., 2021). Sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi pada umumnya. Beberapa ciri khusus adalah: 1) Hasil investasi yang ditawarkan oleh penerima dana atau penerbit kepada pemegang Obligasi Syariah harus bebas dari unsur melawan hukum, 2) Hasil yang diperoleh pemegang obligasi syariah harus sesuai dengan akad yang digunakan di awal, dan 3) Pengalihan kepemilikan keluarga harus sesuai dengan perjanjian yang digunakan. Kemudian Campisi et al (2018) menjelaskan bahwa sukuk memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Bukan instrumen hutang, tetapi tindakan kepemilikan bersama atas properti atau proyek tertentu, 2) Setiap penerbitan Sukuk memiliki nilai dasar. Tingkat target mengacu pada aset yang mendasari penerbitan sukuk, dan 3) Kepemilikan keluarga didasarkan pada proyek atau aset tertentu.

Metode Penerbitan Sukuk

Santoso (2020) menyampaikan bahwa tata cara penerbitan sukuk di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Pembentukan sukuk memerlukan keterlibatan beberapa pihak, yaitu pemilik sah harta, *special purpose vehicle* (SPV), yaitu lembaga penerbit sukuk, pemilik sukuk atau investor. b. Pada langkah selanjutnya, originator memilih aset untuk dijual ke SPV dengan nilai yang disepakati dan dalam waktu yang ditentukan. c. Setelah itu, SPV mengamankan kepemilikan melalui kesepakatan bersama.

Pembiayaan Daerah

Pendanaan daerah berarti semua pengeluaran daerah yang diperoleh daerah, serta pendapatan daerah yang dikenakan penggantian atau penerimaan yang bertujuan untuk menggunakan surplus anggaran dan menutupi defisit anggaran (Cuny, 2018). Defisit dan surplus anggaran muncul ketika anggaran belanja dan pendapatan daerah

menyimpang. Pengertian keuangan daerah menurut Odusami & Mansur (2022) adalah bahwa APBD mencakup semua pengeluaran dan penerimaan daerah yang mengalir masuk dan keluar daerah pada tahun anggaran itu atau tahun berikutnya atau sebaliknya. Dikatakan Odusami & Mansur (2022) bahwa investor dapat menghitung risiko finansial dari tindakan mitigasi - yang disiapkan untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut di setiap negara bagian - dengan melihat bagaimana kinerja obligasi daerah. Sebagian besar negara bagian mengalami penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan sebagai akibat dari program mitigasi, yang juga mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan secara signifikan.

Mawardi et al (2022) menggunakan metode *analytic network process* (ANP) dengan empat kelompok responden yang bersangkutan, yaitu perwakilan pemerintah daerah, akademisi dari perguruan tinggi, praktisi yang ahli di bidangnya, dan regulator. Penerbitan Sukuk Daerah didukung oleh empat faktor yaitu penerbit (pemda atau pemerintah), investor, pasar, dan infrastruktur. Faktor dengan skor tertinggi adalah kurangnya dedikasi pemerintah daerah untuk menerbitkan sukuk daerah karena pergantian kepemimpinan yang terjadi setiap lima tahun sekali. Untuk mendorong pemerintah daerah menerbitkan Sukuk Daerah, maka perlu dilaksanakan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur dan mengatur penerbitannya serta dukungan pemerintah pusat.

Bintarti & Fahamsyah (2018) menyatakan pemerintah daerah bertugas meningkatkan kualitas pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, obligasi syariah yang sering disebut sukuk dapat menjadi salah satu metode pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan Financial Capability Index (FCI), Maximum Loan

Index (MLI), dan Financial Accountability Index (FAI) berdasarkan rekening keuangan Kabupaten Bekasi, akan ditentukan potensi sukuk di kabupaten tersebut. Dengan mencontohkan Kabupaten Bekasi, dapat dilihat bahwa daerah memiliki potensi yang besar untuk menerbitkan Sukuk Daerah, yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan utama untuk meningkatkan standar pariwisata. Dalam situasi ini kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sangat ditekankan karena peningkatan jumlah wisatawan akan meningkatkan pendapatan daerah.

Siswanto & Surya (2021) membahas obligasi hijau Prancis banyak diminati dan memiliki imbal hasil yang lebih rendah dibandingkan obligasi lainnya. Selain itu, ciri khas ikatan hijau sebanding dengan ikatan iklim. Selain itu, pasar obligasi hijau mirip dengan obligasi biasa. Oleh karena itu, kemungkinan bagi investor sebanding, meskipun obligasi hijau kurang likuid dibandingkan yang lain. Investor menginginkan green bond dengan harga yang kompetitif. Selain itu, mereka memiliki preferensi tertentu karena obligasi hijau yang berdaulat tidak ketat. Obligasi hijau berkinerja lebih baik daripada obligasi standar dalam situasi lain. Komponen ini juga melibatkan kepedulian terhadap keberlanjutan. Durasi obligasi iklim tidak terkait dengan jumlah obligasi. Siswanto menambahkan, agar green bond dipahami oleh investor, maka harus distandarasi. Karena SDG mencakup standar yang berbeda untuk setiap ikatan hijau, ini juga mencakup penentuan tujuan SDG.

Noordin et al., (2018) menyatakan Undang-undang Social Impact Bond (SIB) 2014 di AS unik dari obligasi konvensional dalam beberapa hal. Istilah "obligasi" sebenarnya adalah "misnomer," menurut Pasi (2014, hlm. 4), karena SIB tidak terstruktur seperti obligasi daerah tradisional atau instrumen utang pendapatan tetap lainnya, di mana SIB tidak memiliki modal atau pengembalian

yang dijamin. Karena pengembalian investor didasarkan pada keberhasilan inisiatif sosial daripada dijamin oleh aset dasar apa pun, SIB lebih mirip dengan sarana investasi ekuitas. Akibatnya, ini memerlukan sejumlah risiko investasi, jika proyek gagal, investor dapat kehilangan semua uang mereka. Berlawanan dengan ekuitas, investor SIB tidak memiliki ekuitas atau saham di perusahaan. SIB memiliki karakteristik obligasi tertentu, meskipun bukan obligasi konvensional. Misalnya, ia memiliki durasi yang ditetapkan, pengembaliannya didasarkan pada tarif yang dipatok, dan keuntungannya terbatas.

Cuny (2018) menyatakan obligasi daerah lebih mahal untuk dibeli oleh investor kecil daripada investor besar, sebagian karena leverage negosiasi investor ritel dibatasi oleh tingginya biaya penemuan dan informasi rekanan. Oleh karena itu, pasar obligasi daerah menawarkan lingkungan tunggal yang kondusif untuk menganalisis seberapa besar pengaruh informasi fundamental terhadap daya tawar investor. Investor ritel sekarang memiliki akses yang jauh lebih mudah ke data fundamental berkat pembuatan repositori pusat gratis untuk transparansi (EMMA). Temuan saya menunjukkan bahwa EMMA meningkatkan daya tawar investor ritel dengan dealer dibandingkan dengan investor institusi, terlepas dari tidak adanya ketepatan waktu dan homogenitas dalam pengungkapan. Penurunan premi yang dibayarkan investor kecil kepada investor besar untuk membeli obligasi merupakan tanda bahwa daya tawar telah selaras.

Wang & Yang (2021) menyatakan dana obligasi daerah memiliki sensitivitas aliran-kinerja yang tinggi, yang menyiratkan bahwa pengelola dana memiliki insentif yang kuat untuk menurunkan biaya transaksi yang digerakkan oleh arus. Kami menemukan bahwa kumpulan dana membantu perdagangan silang di seluruh dana

tertutup terkait, yang memberikan likuiditas dana terbuka yang tertekan. Cross-trading seperti itu meningkatkan kinerja dana open-end yang tertekan. Dana nasional, yang lebih peka terhadap arus kinerja daripada dana satu negara, memiliki bukti lintas perdagangan yang lebih kuat daripada dana satu negara. Selanjutnya, subsampel dari dana open-end yang dikelola oleh penasihat dengan kebijaksanaan yang lebih besar untuk terlibat dalam perdagangan lintas agen terutama bertanggung jawab atas hasil yang disebutkan di atas. Selain itu, kami menemukan bahwa dana open-end dengan sedikit uang tunai adalah peserta terbesar dalam perdagangan silang, yang menunjukkan bahwa perdagangan silang digunakan sebagai saluran tambahan untuk mengelola likuiditas selain penyangga likuiditas konvensional. Kami menemukan bahwa kelompok dana sering memilih dana tertutup bernilai rendah untuk terlibat dalam perdagangan silang untuk tujuan memasok likuiditas, yang berimplikasi pada pasar utang pemerintah daerah yang berkembang pesat di pasar negara berkembang seperti China. Hal ini konsisten dengan subsidi silang dana dan maksimalisasi nilai keluarga. Menarik basis investor besar di pasar sekunder sangat penting untuk menurunkan biaya pinjaman di pasar primer, yang diperlukan untuk menciptakan pasar primer yang berkembang pesat yang menawarkan pembiayaan penting bagi pemerintah daerah. Di pasar yang tidak likuid, sarana investasi seperti reksa dana menawarkan kepada investor (terutama investor ritel) pilihan yang efektif untuk terlibat dalam pasar utang pemerintah daerah. Artikel kami menekankan pentingnya dan mekanisme manajemen likuiditas di pasar tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2014: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk

memahami fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, observasi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara komprehensif dan dalam konteks alamiah tertentu serta menggunakan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis SWOT.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*indepth interview*) dengan kepala sub divisi pembiayaan Badan Pengelola keuangan daerah DKI Jakarta. Juga dengan menganalisis laporan APBD yang dipublikasikan melalui laman resmi pemerintah provinsi DKI Jakarta. Menurut Rangkut (2009: 21) ada tiga tahap analisis SWOT yaitu:

1. Fase collecting data

Pada fase awal, informasi dan pengetahuan tentang faktor internal dan eksternal dikumpulkan. Pada langkah ini, matriks faktor strategi internal dan matriks faktor strategi eksternal digunakan sebagai model.

2. Analysis Step

Matriks yang diperoleh dari hasil matriks faktor strategis dijelaskan dalam bentuk diagram SWOT dengan cara mengurangkan nilai kuat dengan nilai lemah dan nilai peluang. Kemudian dianalisis dalam empat strategi alternatif yang dapat dikejar oleh organisasi. Apakah itu strategi Strengths-Opportunities (SO), Weaknesses-Opportunities (WO), Strengths-Threats (ST) atau Weakness-Threats (WT).

3. Pengambilan keputusan

Fase akhir, strategi yang sudah dirumuskan tadi diperiksa kembali. Lalu diambil keputusan untuk menentukan strategi organisasi yang paling menguntungkan, efisien dan efektif berdasarkan matriks dan terakhir rencana strategis dapat dibuat untuk digunakan sebagai panduan untuk tindakan selanjutnya.

Studi ini berbasis di DKI Jakarta dan melibatkan narasumber pemerintah daerah, peneliti dan praktisi. Dalam

penelitian ini digunakan teknik purposive sampling untuk pengambilan sampel yaitu penentuan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang ditetapkan untuk subjek sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel data untuk penelitian ini adalah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki aspek penawaran dan permintaan yang paling sesuai untuk kemungkinan pengenalan sukuk (Hamzah, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi biaya modal DKI Jakarta terdiri dari:

1. Penyertaan Modal Negara Target penyertaan modal negara dalam APBN tahun 2021 adalah sebesar Rp9.663.965.026.671,00 dan realisasi akhir tahun anggaran 2021 adalah sebesar 5.906.817.230,20,65,65%.
2. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Target Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah - Perekonomian pemerintah tercatat Rp33.650.000.000,00 pada APBN tahun 2021, sedangkan realisasi pada akhir TA 2021 adalah Rp33.629.620,49%,990%. Membayar pinjaman rumah dan pemerintah.
3. Pemberian Pinjaman Daerah Pemkot Target pinjaman daerah pemkot dianggarkan sebesar Rp200.000.000.000,00 pada APBD tahun 2021, sedangkan realisasi akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp200.000.000.000. Dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, posisi SiLPA tercatat pada tahun buku 2021 sebesar Rp9.721.718.831.341,00. Pencapaian sasaran kinerja ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 ditunjukkan dalam rangkuman pelaksanaan APBD berikut ini :

Tabel 1. APBD DKI Jakarta 2022

No	Uraian	(dalam rupiah)			
		Anggaran 2021	Realisasi 2021	Δ%	Realisasi 2020 (Audited)
	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PENDAPATAN	66.209.105.040.795	65.567.009.199.000	100,55	55.887.004.237.727
1.1	Pendapatan Asli Daerah	45.182.087.250.967	41.606.307.405.630	92,09	37.414.754.711.193
1.2	Pendapatan Transfer	16.873.544.789.828	22.673.794.344.052	134,37	16.962.899.288.632
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	3.153.473.000.000	1.286.907.449.318	40,81	1.509.350.237.902
2	BELANJA & TRANSFER	69.992.620.674.676	61.619.040.160.565	88,04	52.088.133.625.022
2.1	Belanja Operasi	57.799.906.974.328	53.925.743.776.335	93,30	43.835.699.863.256
2.2	Belanja Modal	8.761.139.729.965	6.865.827.016.719	78,37	3.173.223.520.882
2.3	Belanja Tak Terduga	3.043.969.206.971	439.889.457.199	14,45	4.707.937.545.524
2.4	Transfer - Bantuan Keuangan	387.604.963.312	387.579.910.312	99,99	371.272.698.360
	Surplus/Defisit	- 4.783.515.833.781	3.947.969.038.435		3.798.870.609.705
3	PEMBIAYAAN	4.783.515.833.781	6.773.749.792.906		1.366.625.440.491
3.1	Penerimaan Pembiayaan	14.681.130.860.452	11.914.196.646.991	81,15	5.582.616.579.812
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	9.897.615.026.671	6.140.446.854.085	62,04	4.215.991.139.321
4	SILPA		9.721.718.831.341		6.165.696.050.196
	Penyesuaian: Selisih Kurs Sebelum Terealisasi		0		240.163
	SILPA Setelah Koreksi dan Penyesuaian		9.721.718.831.341		6.165.696.290.359

Sumber: Pemprov DKI Jakarta, 2022

Yang menjadi penyebab masih banyak nya dana selisih pembiayaan yang belum terserap yaitu: Pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah salah satu program pemerintah pusat dalam rangka recovery ekonomi nasional selama pandemi covid 19, salah satu bagian utama dari program PEN adalah untuk menopang UMKM. Daerah yang diutamakan dalam dukungan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemda untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah yang terimbas oleh pandemi 2020 dan 2021. Beberapa bentuk proyek yang didanai oleh PEN ini adalah Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Jembatan penyeberangan orang (JPO) flyover Tapal Kuda Lenteng Agung sudah selesai dibangun.

Berdasarkan analisa biaya modal untuk APBD DKI Jakarta tahun 2022 telah diperoleh SWOT berdasarkan matriks EFAS dan IFAS dalam table 2 berikut.

Tabel 2. Matriks EFAS dan IFAS

No.	PELUANG (O)	BOBOT
1	Kekuatan DKI Jakarta sebagai Ibu kota NKRI	1,5
2	Birokrasi untuk memperoleh izin dari Pemerintah DKI Jakarta	1,2
3	Kemajuan Teknologi yang tinggi dalam upaya meningkatkan efisiensi di lingkungan DKI Jakarta	1,8
4	DKI Jakarta memiliki beberapa MoU dengan pihak eksternal	0,1
5	Kerjasama dengan daerah sekitar DKI Jakarta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1
	Total Bobot Peluang (O)	5,6
	ANCAMAN (T)	BOBOT

1	Adanya dukungan dari lembaga penelitian dan pengembangan dalam melakukan riset di DKI Jakarta	0,4
2	Dukungan pemerintah pusat berupa transfer daerah untuk upaya pembangunan DKI Jakarta	0,4
3	Adanya wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan	0,6
4	Dampak dari resesi global di 2023	0,4
5	Iklm yang semakin tidak menentu	1
	Total Bobot Ancaman (T)	2,8
	KEKUATAN (S)	BOBOT
1	Posisi Geografis DKI Jakarta sebagai ibu kota negara RI	1,8
2	Ketersediaan <i>Green Infrastructure</i> yang sudah dibentuk dalam beberapa proyek	1,5
3	Infrastruktur Perekonomian di DKI Jakarta	0,45
4	Budaya kerja masyarakat DKI Jakarta dalam berwirausaha	0,1
5	Potensi pariwisata di DKI Jakarta	1,2
	Total Bobot Kekuatan (S)	5,05
NO.	KELEMAHAN (W)	BOBOT
1	Sumber Daya Alam yang masih belum tereksplor	1,5
2	Kewenangan dalam regulasi terbatas	1,5
3	Sosialisasi potensi daerah kepada investor yang terbatas	1,2
4	Sistem birokrasi dalam iklim investasi di DKI Jakarta masih belum kondusif	0,5
5	APBD masih belum maksimal mendukung pembangunan di DKI Jakarta	1,2
	Total	5,9

Pada tabel berikut menunjukkan bahwa alternatif strategi yang menghasilkan bobot paling tinggi adalah strategi *Weaknesses-Opportunities (WO)*, atau *Weaknesses-Opportunities* bisa disebut sebagai strategi yang akan dimaknai meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah DKI Jakarta cukup sulit untuk melakukan pembangunan dalam kondisi yang berpihak pada golongan menengah ke bawah sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih optimal dengan distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan demikian, pertumbuhan industri DKI Jakarta dapat dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM DKI Jakarta. Oleh karena itu, kemungkinan penerbitan Sukuk Daerah untuk mendukung pembiayaan infrastruktur di DKI Jakarta menjadi sangat penting.

Tabel 3. Pembobotan Strategi

Prioritas	Strategi	Bobot
1	Kelemahan-peluang	11,5
2	Kekuatan-peluang	10,65
3	Kekuatan-ancaman	8,1
4	Kelemahan-ancaman	7,25

Berdasarkan pembobotan strategi pada table 3 di atas diperoleh hasil bahwa strategi yang dapat dilakukan adalah strategi kelemahan-peluang (WO). Adapun strategi Kelemahan-Peluang sesuai dengan matriks di atas adalah

1. Merumuskan Petunjuk Teknis yang menjadi turunan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.04/2017 Tahun 2017, karena sampai saat ini aturan lebih lengkap mengenai perumusan persiapan penerbitan sukuk maupun obligasi daerah belum ada, sehingga bisa membuat solusi dari kelemahan ini dari peluang regulasi POJK yang sudah ditetapkan sejak 2017. Juknis ini lebih kepada bagaimana pelaporan yang akan menjadi detail antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
2. Kesiapan SDM yang menjadi kelemahan dalam persiapan penyusunan penerbitan sukuk atau obligasi daerah harus disiasati dengan memberikan pelatihan dan pembentukan tim khusus yang terpisah dari BPKD agar pekerjaan BPKD sebelumnya tidak tercampur dengan proyek sukuk daerah, karena dalam kaitannya dengan tim khusus sukuk daerah ini perlu dibentuk melalui juknis yang diharapkan bisa dibentuk sesuai dengan peraturan POJK Nomor 63/POJK.04/2017 Tahun 2017.
3. Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan menghitung kembali bagaimana kekuatan keuangan dikarenakan kelemahan keuangan yang saat ini masih membayar hutang pinjaman pusat dan pinjaman luar negeri dari Jepang untuk proyek-proyek besar seperti MRT, LRT dan underpass. Dikhawatirkan jika pemerintah daerah membuat kebijakan penerbitan sukuk

- daerah nantinya akan tidak bisa memenuhi imbal hasil yang di inginkan.
4. Output yang nantinya akan menjadi proyek di dalam sukuk daerah harus diperjelas karena terkait dengan *green infrastructure*, pemerintah pusat sudah memberikan rambu agar semua infrastruktur memperhatikan aspek green, namun sebagai kewenangan pemerintah daerah seperti apa objek *green infrastructure* tersebut masih belum jelas, maka perlu adanya kewenangan yang diatur dalam regulasi agar tidak tercampur dengan kewenangan pemerintah pusat.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu penerbitan *municipal sukuk* atau sukuk daerah belum memuat petunjuk teknis yang terdapat kepastian hukum kepada Dewan Pemprov DKI Jakarta. Secara teknis bersumber dari POJK Nomor 63/POJK.04/2017 Tahun 2017 Mendukung Pembiayaan Infrastruktur Hijau di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil analisis SWOT, hasil penelitian ini merumuskan strategi yang diupayakan agar penerbitan sukuk hijau daerah tercapai di DKI Jakarta adalah memitigasi kelemahan regulasi yang ada untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi Weakness Opportunity (WO) berdasarkan matriks interaksi EFAS-IFAS-SWOT terlihat seperti dibawah ini :

- 1) Menyusun petunjuk teknis turunan dari Peraturan Otoritas Keuangan No. 63/POJK.04/2017 Tahun 2017.
- 2) Kesiapan SDM yang menjadi kelemahan dalam persiapan penyusunan penerbitan sukuk atau obligasi daerah harus disiasati dengan memberikan pelatihan dan pembentukan tim khusus yang terpisah dari BPKD.
- 3) Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan menghitung kembali bagaimana kekuatan keuangan dikarenakan kelemahan keuangan yang saat ini

masih membayar hutang pinjaman pusat dan pinjaman luar negeri dari Jepang.

- 4) Output yang nantinya akan menjadi proyek di dalam sukuk daerah harus diperjelas kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang terkait dengan *green infrastructure*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis Berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada DIPA LPPM Universitas Terbuka yang telah mendukung dari proses pembuatan penelitian ini hingga pendanaan dan sampai selesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. (2016). Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Harmoni*, 152-164.
- Abrorov, S. (2020). The importance of sukuk in the development of economy: As an example of its impact on the income of the Malaysian population. *Journal of Critical Reviews*, 7(2), 776-780. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.02.142>
- Ahmed, H. (2019). Fiscal policy and deficit financing: Islamic perspectives. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 32(1), 79-85. <https://doi.org/10.4197/Islec.32-1.5>
- Aladdin, A. A., Gordienko, M., Nekrasova, V., & Javid, A. F. (2020). Fiscal potential of the investment mechanism of Islamic finance. *E3S Web of Conferences*, 220, 1-5. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20222001012>
- Amornsiripanitch, N. (2022). The real effects of municipal bond insurance market disruptions 1. *Journal of Corporate Finance*, 75(April), 102240. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2022.102240>
- Aziz, S., Ashraf, D., & El-Khatib, R. (2021). Societal trust and Sukuk activity. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 74(July), 101384. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101384>
- Bhuiyan, R. A., Rahman, M. P., Saiti, B., & Mat Ghani, G. (2019). Co-movement dynamics between global sukuk and bond markets: New insights from a wavelet analysis. *International Journal of Emerging Markets*, 14(4), 550-581. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-12-2017-0521>
- Campisi, D., Gitto, S., & Morea, D. (2018). Shari'ah-compliant finance: A possible novel paradigm for green economy investments in Italy. *Sustainability (Switzerland)*, 10(11), 1-12. <https://doi.org/10.3390/su10113915>
- Cornaggia, K., Hund, J., & Nguyen, G. (2022). Investor attention and municipal bond returns. *Journal of Financial Markets, September 2021*, 100738. <https://doi.org/10.1016/j.finmar.2022.100738>
- Cuny, C. (2018). When knowledge is power: Evidence from the municipal bond market. *Journal of Accounting and Economics*, 65(1), 109-128. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2017.11.002>
- Darus, F., Ahmad Shukri, N. H., Yusoff, H., Ramli, A., Mohamed Zain, M., & Abu Bakar, N. A. (2017). Empowering social responsibility of Islamic organizations through Waqf. *Research in International Business and Finance*, 42(May), 959-965. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.030>
- Harimurti, A. J., Zaky, A., & Brawijaya, U.

- (2011). *OBSTACLES AND STRATEGY OF MUNICIPAL ISLAMIC BONDS ISSUANCE AS OBSTACLES AND STRATEGY OF MUNICIPAL ISLAMIC BONDS ISSUANCE AS AN ALTERNATIVE OF MUNICIPAL FUNDING*. 33, 1–14.
- Ibrahim, A. J., & Shirazi, N. S. (2020). The role of islamic finance in fostering circular business investments: The case of oic countries. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 41(1), 89–120.
- Keshminder, J. S., Abdullah, M. S., & Mardi, M. (2022). Sukuk daerah– Malaysia surviving the bumpy road: performance, challenges and reconciled issuance framework. *Qualitative Research in Financial Markets*, 14(1), 76–94. <https://doi.org/10.1108/QRFM-04-2021-0049>
- Khoshnava, S. M., Rostami, R., Zin, R. M., Kamyab, H., Abd Majid, M. Z., Yousefpour, A., & Mardani, A. (2020). Green efforts to link the economy and infrastructure strategies in the context of sustainable development. *Energy*, 193, 116759. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.116759>
- Laila, N., Rusmita, S. A., Cahyono, E. F., & Azman-Saini, W. N. W. (2021). The role of financial factors and non-financial factors on corporate bond and sukuk rating Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(8), 1077–1104. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2019-0187>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., & Al Mustofa, M. U. (2022). Constraints and strategies for municipal Sukuk issuance in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(3), 464–485. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2021-0082>
- Muharam, H., Anwar, R. J., & Robiyanto, R. (2019). Islamic stock market and sukuk market development, economic growth, and trade openness (The case of Indonesia and Malaysia). *Business: Theory and Practice*, 20(2014), 196–207. <https://doi.org/10.3846/BTP.2019.19>
- Odusami, B. O., & Mansur, I. (2022). Economic Fundamentals, Policy Responses, and State-Level Municipal Bond Sensitivity to COVID-19 Prevalence. *North American Journal of Economics and Finance*, 61(November 2021), 101693. <https://doi.org/10.1016/j.najef.2022.101693>
- Richardson, E. (2019). Responsible finance sukuk - Can they bring societal value to a value-neutral market? *Capital Markets Law Journal*, 14(3), 394–428. <https://doi.org/10.1093/cmlj/kmz011>
- Santoso, I. R. (2020). Sukuk daerah and sustainable economic development goals: Mitigating climate change in Indonesia. *Global Journal Al-Thaqafah*, 10(1), 18–26.
- Smaoui, H., Mimouni, K., & Temimi, A. (2020). The impact of Sukuk on the insolvency risk of conventional and Islamic banks. *Applied Economics*, 52(8), 806–824. <https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1646406>
- Wang, Z. J., & Yang, J. (2021). Cross-trading and liquidity management: Evidence from municipal bond funds. *Pacific Basin Finance Journal*, 67(November 2020), 101564. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2021.101564>